

Kilas Balik Kondisi HAM 2006 HAK ASASI MANUSIA BELUM JADI ETIKA & PERADABAN POLITIK

Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengucapkan Selamat Hari Natal 2006, Selamat Hari Raya Idul Adha 2006, dan Selamat Tahun Baru 2007. Semoga hari-hari besar itu dan hari-hari esok selanjutnya selalu membawa damai bagi kita semua, untuk terus berkarya, kerja keras bersama, memperjuangkan keadilan dengan kesabaran-Nya. Ammiin.

Tahun ini menjadi tahun yang kelabu bagi korban. Hari ini kami berduka dan harus rela kehilangan satu lagi kerabat tercinta, Bapak Enus Yunus, orangtua Hafidhin Royan, mahasiswa yang tewas dalam unjuk rasa damai di Trisakti, 12 Mei 1998. Saat ini pula, kami semakin prihatin dengan kondisi hukum dan keadilan di tanah air, yang gagal menghukum pelaku-pelaku pembunuh Munir. Menyedihkan.

Pada tahun ini, ada beberapa arena HAM yang mengalami kemajuan. Di tingkat PBB, setelah menjadi anggota Dewan HAM, Indonesia kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Ini juga diikuti sikap terbuka Indonesia terhadap Pengesahan Konvensi Orang Hilang dan Deklarasi Indigenous People. Di ASEAN, Indonesia cukup aktif mempromosi demokratisasi di Burma, dan pembentukan mekanisme HAM regional. Ini semua cermin kinerja Departemen Luar Negeri.

Pada di tingkat nasional, proses perdamaian Aceh dapat terus berjalan, bahkan berhasil melaksanakan Pilkada-I dengan aman dan damai. Sepanjang tahun 2006, tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh jauh menurun dibandingkan pada tahun 2005.¹ Ini karena MoU Helsinki Pemerintah RI & GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 berjalan dengan baik, berkat pengawasan Aceh Monitoring Mission (AMM). Keadaan ini membuat terjadinya *trust building* antara RI dan GAM. Namun begitu, sampai dengan akhir tahun 2006, Pemerintah dan AMM belum mampu menangani kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi selama tahun 2006.

Polri mulai mau menertibkan senjata api. RUU Anti Pornoaksi dan Pornografi batal disahkan pada Juni 2006. Presiden mengambil sikap atas merebaknya kekerasan di masyarakat melalui pewacanaan nilai intrinsik Pancasila. Meski kekerasan masih ada, hubungan antar agama telah membaik, berkat dialog lintas agama dari sejumlah organisasi sosial keagamaan, dan juga organisasi perempuan yang mempromosikan kebhinekaan bangsa Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus pasal-pasal *hatzaai artikelen* (penghinaan presiden) dari penerapan hukum pidana.

Meskipun telah ada kemajuan, kami menemukan banyak sekali arena-arena yang tak berubah, malah mengalami kemunduran. Refleksi akhir tahun KontraS untuk tahun 2006 sampai pada kesimpulan bahwa tahun ini situasi HAM telah memasuki tahap genting. HAM diserang dari segala penjuru. Bukan hanya nilai, norma dan aturannya, tapi juga institusi penopang tegaknya HAM. HAM seharusnya memiliki peran utama dalam politik, ekonomi dan hukum; tapi pada tahun ini HAM dipinggirkan oleh cara pandang dan kepentingan sempit elite penguasa. Institusi tertinggi di bidang hukum, Mahkamah Agung, masih menutup akses korban. Institusi legislatif, hanya janji-janji kepada korban tapi tak serius memperjuangkannya.

Politik Presiden bukan politik HAM sejati. Proses perdamaian Aceh cenderung menolak partisipasi korban konflik Aceh guna memperoleh keadilan. Penanganan masalah Papua masih berputar-putar di permukaan. Polemik PT Freeport dalam kasus-kasus pembayaran jasa keamanan ilegal, pencemaran lingkungan hingga penembakan warga sipil luput dari perhatian. Rencana Pemerintah merevisi Otsus malah mengundang kecurigaan untuk menghapuskan pasal-pasal krusial dalam UU Otsus, mulai dari soal pembentukan partai lokal yang tak kunjung terealisasi, Pengadilan HAM dan KKR.

Kinerja instansi negara seperti POLRI belum berubah. TNI dan BIN menghantui masyarakat sipil lewat trauma politik masa lalu; pro dan anti komunisme. Aparat TNI berkelahi dengan aparat POLRI,

¹ Tabulasi data KontraS Aceh

bahkan ketika berada di suatu wilayah tertentu. Kekerasan masih tumbuh subur. Kekerasan tak lagi sekadar melukai integritas personal seorang warga, tapi telah merusak fundamen kenegaraan.

2006: Tahun Impunitas & Hilangnya Wibawa Hukum.

Tahun ini menjadi tahun gagalannya Pemerintah SBY untuk mengadili mantan Presiden Soeharto atas dugaan kasus korupsi yayasannya dan kejahatan lainnya. Keputusan Jaksa Agung mengeluarkan SKP3 dan dalih kemanusiaan elite politik yang mendukungnya, telah menihilkan seluruh nilai moral dan politik dari reformasi mahasiswa. Negara membuat kejahatan masa lalu tak memiliki arti, hilang dan tak terdefiniskan. Agenda reformasi untuk adili Soeharto dimatikan.

Penghentian kasus Soeharto menyempurnakan ketiadaan hukuman atas sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu, antara lain peristiwa 1965-1968, peristiwa Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, lalu penculikan aktivis, penembakan mahasiswa, kerusuhan politik, dan lain-lain. Jaksa Agung bersikap konservatif dan tidak berpihak pada korban. Mahkamah Agung menggugurkan semua harapan korban akan keadilan dan resisten terhadap upaya pembaharuan peradilan. TNI resisten terhadap hukum dan HAM melalui promosi perwira bermasalah. Di sini, ketidakmauan negara mengakhiri impunitas militer malah menyerang balik pemerintahan yang sebenarnya melindungi. Contoh, dalam hiruk pikuk politik mantan petinggi militer Orde Baru; Try Sutrisno dan Wiranto beserta para purnawirawan militer lain.

Di akhir tahun, Presiden SBY memberi remisi untuk Pollycarpus (bebas) pada 25 Desember. Sebelum itu pada 3 November, Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bersalah Pengadilan Negeri (PN) atas Pollycarpus pada pembunuhan Munir, menghukumnya dua tahun penjara atas penggunaan surat palsu. Di tahun ini, kasus-kasus besar berakhir tragis. Diakui ada kejahatan, tapi tak ada pelaku. Tak satupun ada yang diadili atas ribuan korban pelanggaran HAM semasa Soeharto. Tak satupun pelaku diadili atas tewasnya aktivis HAM Munir. Selain kegagalan hukum, ini merupakan kegagalan Pemerintah SBY dalam mereformasi Badan Intelijen Negara.

2006: Institusi Reformasi Penopang HAM diserang

Tahun ini adalah tahun pembusukan institusi-institusi reformasi. Berbagai komisi independen diserang wibawa dan keberadaannya. Komisi HAM terus didelegitimasi dan makin tidak efektif, terakhir saat Jaksa Agung menolak penyelidikan kasus penculikan aktivis 1997-1998. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) diabaikan. Komisi Penyiaran Independen (KPI) dibayangi Depkominfo. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi punya Pengadilan Tipikor. Kewenangan Komisi Yudisial (KY) dipangkas. Komisi Ombudsman (KON) diacuhkan. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Komisi Kejaksaan diabaikan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) jadi sasaran tembak. Terakhir, pembentukan UKP3R “diendapkan”.

DPR gagal membahas RUU KMIP. Presiden tak tegas menarik RUU Rahasia Negara, termasuk RUU Intelijen Negara. Presiden juga ragu-ragu RUU Revisi UU Peradilan Militer. Hampir semua legislasi yang telah ada maupun akan disahkan, lemah dari segi legitimasi korban. Keberpihakan Mahkamah Konstitusi pada UUD 1945 seperti tampak pada putusan pembatalan UU Tipikor dan KKR.

2006: HAM diserang Wacana Anti Komunis

Di bandingkan pada tahun 2005, terjadi penurunan aksi premanisme berbau SARA. Namun tahun 2006 diwarnai aksi yang ingin memicu prasangka sosial atas nama bahaya komunisme. Bila dibiarkan, berpotensi memasung kebebasan, memicu prasangka bahkan pertikaian horisontal. Contoh, lontaran pernyataan politik tentang bahaya komunisme dari para petinggi militer (Pangdam Jaya-Bukit Barisan-Wirabuana, intelijen militer dan sipil) termasuk lewat penggunaan forum sosialisasi anti terorisme untuk wacana anti komunisme. Contoh lain adalah menuding/mencurigai aktifitas korban, buruh dan masyarakat miskin kota sebagai kebangkitan PKI. Tudingan ini dilakukan dengan cara membuat deklarasi /posko, demonstrasi hingga aksi sepihak membubarkan pertemuan korban-korban diskriminasi Orde Baru sebagai kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tabel
Pernyataan dan Aksi Kekerasan atas nama Bahaya Komunis

No	Waktu	Pernyataan & aksi anti komunis	Keterangan
	7 Maret	Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo menegaskan, gerakan komunis semakin intensif di wilayah Ibu Kota. Gerakan ini bertujuan masuk dalam percaturan politik Indonesia menuju Pemilihan Umum 2009.	Penegasan Agustadi disampaikan kepada pers sebelum membuka Rapat Pimpinan Kodam Jaya di Aula Ahmad Yani, Markas Kodam Jaya, Selasa (7/3).
	1 Mei	Ketua Centre for Indonesia Comunisme Study (CICS) Drs Arukat Djaswadi Semua komponen bangsa, termasuk buruh harus mewaspadaai bangkitnya komunis yang menyusup ke dalam berbagai organisasi buruh.	"Karena itu jangan sampai buruh yang merupakan komponen bangsa secara tidak sadar disusupi paham komunis,
	20 Mei	Aksi penghentian pertemuan ibu-ibu korban 65, Syarikat dan Komnas Perempuan oleh Laskar Siliwangi dan Pemuda Panca Marga di Bandung	
	23 Mei	Sekitar 200 orang dari berbagai organisasi kepemudaan membubarkan Seminar Pasamoan Perempuan-perempuan tangguh bertema "Menggugah Nurani Menggapai Rekonsiliasi Memperkuat NKRI" yang digelar di Bandung. Padahal acara ini diadakan oleh lembaga resmi Komnas Perempuan, lembaga INCREs (Institute for Culture and Religion Studies), Syarikat Indonesia.	Selain itu, acara ini dihadiri oleh 60 peserta perempuan lanjut usia. Mereka dituding sebagai anggota PKI. Para pelaku kekerasan diantaranya Pagar (Persatuan Anti Gangguan Regional), dan Patriot Panca Marga (PPM). ² Anehnya, Kepolisian justru memeriksa panitia, bukan orang-orang yang membubarkan paksa.
	23 Mei	Aksi penyegelan kantor Fahmina Institute Cirebon yang menolak RUU APP oleh FPI, MMI dan HTI	
	13 Juni	Syamsir Siregar (Ka BIN) menyatakan BIN telah memantau beberapa pertemuan orang-orang yang berpaham komunisme, dan sudah berlangsung di Blitar, Cipanas Bogor dan Bandung. ³	Pembubaran diskusi korban 65, juga disinyalir sebagai perintah dari BIN.
	19 Juni	DPR juga kerap dituduh telah disusupi oleh komunis yang diampaikan oleh Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo. ⁴	Sejumlah anggota DPR sempat bersuara, mempertanyakan dan meminta klarifikasi TNI atas tuduhan itu, namun tak jelas kelanjutannya.
	21 Juni	Pangdam Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Liliek AS Sumaryo mengatakan, segenap pihak harus meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya laten komunis.	Pangdam akui "Kendati belum ada penyelidikan lebih dalam, ia mengatakan ada indikasi munculnya bahaya komunis. Indikasinya jelas. Ada perbedaan kelas yang dimunculkan, dan seringnya terjadi konflik vertikal dan horizontal. Jangan sampai ada yang memanfaatkan dan menunggangi kondisi ini
	1 Juli	Polisi waspadaai aktivitas PKI Jawa Timur. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur	Di saat bersamaan ada pernyataan sikap yang mengingatkan bakal bangkitnya

² Suara Pembaruan, 23-05-06, Kapolri Harus Klarifikasi Pembubaran Kegiatan Mantan Tapol PKI

³ Media Indonesia, 13-06-06, Aktivitas Komunis Meningkat

⁴ Suara pembaruan, 19-06-06, TNI Diminta Klarifikasi Soal DPR Disusupi Komunis

		Inspektur Jenderal Herman Suryadi Sumawiredja mengatakan hal itu, Jumat (30/6) di Surabaya. Menurut Herman, pertemuan-pertemuan yang pernah dilakukan di Blitar, Kediri, atau Magetan, baru tahap silaturahmi simpatisan PKI, namun polisi tetap mewaspadaai arah gerakannya.	gerakan neo-PKI, ditandatangani Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Front Anti Komunis (FAK), Paguyuban Korban Kekejaman PKI, Solidaritas Anti Komunis (SAKA), Forum Merah Putih (FMP), dan Yayasan Pusat Kajian Komunitas Indonesia (Centre for Indonesian Communication/CICS).
	15 Agustus	Taufik Ismail mengatakan, satu orang per 20 detik meninggal karena pembantaian yang dilakukan oleh komunis selama 74 tahun di 76 negara.	Disampaikan dalam Seminar Nasional menyambut HUT ke-25 LPM Manunggal Undip bertempat di Gedung Pascasarjana Magister Manajemen Jalan Hayam Wuruk Semarang, Senin (14/8).
	20 Agustus	Seorang mahasiswa semester IV fakultas hukum sebuah universitas swasta di Bandung, YP (20), ditangkap jajaran Komando Distrik Militer 0607 Sukabumi. YP hari Kamis (17/8) ditangkap karena menjual 70 kaus bergambar logo Partai Komunis, palu-arit.	Sementara itu Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Ajun Komisaris Odang mengatakan, YP dibawa ke tempat penyablonan kaus itu di Bandung. Hingga berita ditulis, pemilik tempat sablon belum berhasil ditemui.
	5 September	Kepala Kepolisian Wilayah Bogor Komisaris Besar Sukrawardi Dahlan mengatakan, para pejabat dan tokoh masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemunculan kembali paham komunis di Sukabumi, Cianjur, dan Bogor.	Sebanyak 2.000 camat, lurah/kepala desa, dan kepala kampung di Kota/Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur, Senin (4/9), mengikuti sosialisasi bahaya laten komunis dan penanggulangan terorisme di kompleks Secapa Polri, Sukabumi.
	6 September	Kepolisian Wilayah Bogor dan Komando Resor Militer Suryakencana, Bogor, melakukan sosialisasi bahaya laten komunis dan penanggulangan terorisme.	Pernyataan ini disampaikan dalam acara serupa yang berlangsung sehari sebelumnya.
	18 September	Deklarasi Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) Jatim, Minggu (17/9) di Surabaya, nyaris diwarnai bentrokan. Sekitar 50 warga yang menamakan diri sebagai Gerakan Tauhid Anti Komunis dan Forum Anti Komunis mendatangi Gedung Nasional Indonesia, tempat deklarasi dilakukan.	Deklarasi Papernas dilangsungkan dengan kehadiran sekitar 300 simpatisan dari kaum miskin kota, petani dan nelayan, buruh, serta pemuda dan mahasiswa.
	1 Oktober	Unjuk rasa sekitar 20 orang yang berasal dari Forum Anti Komunis mewarnai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Grahadi, Minggu (1/10). Mereka menuding PKI bangkit kembali dengan membangun kekuatan politik melalui Partai Persatuan Pembebasan Nasional.	Orasi dilanjutkan di Taman Bungkul. Upacara Hari Kesaktian Pancasila dipimpin Mayor Inf M Saiful Azis, Komandan Batalyon Infanteri 500 Raider dengan inspektur upacara Gubernur Jatim Imam Utomo yang membacakan teks Pancasila tanpa menyampaikan amanatnya
	5 Oktober	Kepala Badan Intelijen Strategis Mayjend. Syafnil Armen mengatakan, penghayatan sebagian masyarakat atas ideologi Pancasila saat ini mulai mengalami degradasi karena adanya upaya kelompok tertentu yang ingin memaksakan ideologi lain. Gejala ini bisa dilihat dari meningkatnya kelompok radikal sejak reformasi mulai bergulir, salah satu kelompok radikal dalam paper itu adalah Imparsial, Kontras, dan ELSHAM Papua.	Pernyataan ini tertulis dalam papernya berjudul "Presepsi Ancaman Internal dan Transnasional", pada seminar yang diadakan Departemen Pertahanan.
	14 Oktober	Kelompok antikomunis mengajukan hak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ke Mahkamah Konstitusi.	Kelompok antikomunis ini terdiri dari Ketua Yayasan Pusat Kajian Komunitas Indonesia Arukat Djaswadi, Pengurus Yayasan Kanigoro Kediri KH Ibrahim, pengasuh Pondok Tebuireng KH

			Muhammad Yusuf Hasyim, pengurus DPP Gerakan Patriot Indonesia Murwanto S, guru di Banyuwangi Abdul Mun'im, dan Ketua Paguyuban Korban Kekejaman PKI Madiun Mohammad Said.
	12 Desember	Pembubaran peringatan hari HAM dan pemutaran film kasus Munir, Shadow Play dan kasus penculikan	Kapolda Jatim menyurati Kapolri dengan tembusan ke Kontras yang menerangkan aksi pengambilan film oleh kelompok yang menamakan dirinya Front Anti Komunis.
	22 Desember	Pembubaran diskusi Marxisme di Toko Buku Ultimus Bandung. Panitia dan pengisi acara sempat ditangkap polisi, dan diinterogasi selama 1 x 24 jam.	Kasus ini telah dilaporkan kepada Komnas HAM oleh Kontras saat mendampingi beberapa aktivis yang ditangkap, 21 Desember 2006, melalui Enny Soeprapto.

Selain bentuk-bentuk serangan diatas, juga terjadi serangan atas kebebasan sipil lainnya. Contoh, serangan terhadap rumah ibadah jemaah Ahmadiyah di Loe Ujung, Bulukumba pada 17 Februari 2006, pasca keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Kriminalisasi terjadi di Polman, Makassar pada Januari 2006. Atau contoh lainnya, kriminalisasi terhadap pers pada kasus Utan Kayu/Radio 68 H seputar isu RUU APP, lalu kasus Pemred Rakyat Merdeka On Line, kekerasan terhadap kantor Indopos/jawapos, Playboy dan lain-lain. Belum lagi kasus-kasus pembubaran paksa acara-acara seminar, diskusi, dan pemutaran film tentang HAM yang terjadi pada kasus diskusi toko buku Ultimus di Bandung, atau acara Pusham UNAIR di Balai Pemuda Surabaya. Kelompok-kelompok ini mengatasnamakan ormas, para militer dan front anti komunis. Negara bukan hanya membiarkan kekerasan ini terjadi, bahkan terlibat langsung di dalamnya. Pelaku yang menjadi korban umumnya adalah para jurnalis, aktivis HAM, atau korban pelanggaran HAM yang sedang menjalankan hak-haknya tersebut secara damai. Padahal kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu modal mendasar dalam reformasi.

Banyaknya pembubaran yang telah dilakukan oleh sekelompok ormas, merupakan suatu kemunduran total di negara demokrasi. Polisi tak pernah tegas menindak pelaku yang telah melakukan pembubaran secara paksa. Padahal kegiatan diskusi atau pertemuan adalah kegiatan yang legal, yang tak perlu meminta surat izin. Legalitas tersebut sudah jelas ada pada UUD 1945 Pasal 28 tentang kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Di dalam UU No 39/1999 tentang HAM juga menyatakan “setiap orang berhak berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Seolah memberi jawaban di tengah problematika itu, Pemerintah membentuk wadah baru intelijen yang berbasis di daerah, melalui Peraturan Mendagri No 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah.⁵

2006: Tahun Kemunduran Intelijen

Pada tahun 2006, Badan Intelijen semakin mengalami kemunduran. Badan intelijen gagal mencegah dan mendeteksi aksi teror secara dini. Di tengah kegagalan itu, intelijen menjadikan isu terorisme dan komunisme sebagai komoditas politik untuk mendapat *exesive power* dan sebagai pemasang kebebasan. Intelijen hanya bisa menuding tanpa bukti kongkrit, melakukan propaganda untuk pengalihan perhatian. Intelijen gagal bertindak secara profesional dengan tetap mengedepankan HAM.

Contoh-contoh, di kasus kerusuhan Abepura, Kepala BIN Syamsir Siregar dengan lantang menuding keterlibatan LSM dan elite politik seperti Amien Rais yang dinilainya dapat memberi semacam provokasi.⁶ Dalam kasus terorisme, BIN kesulitan membongkar jaringan kelompok teroris Noor Din

⁵ Jawa Pos, 02-12-06,

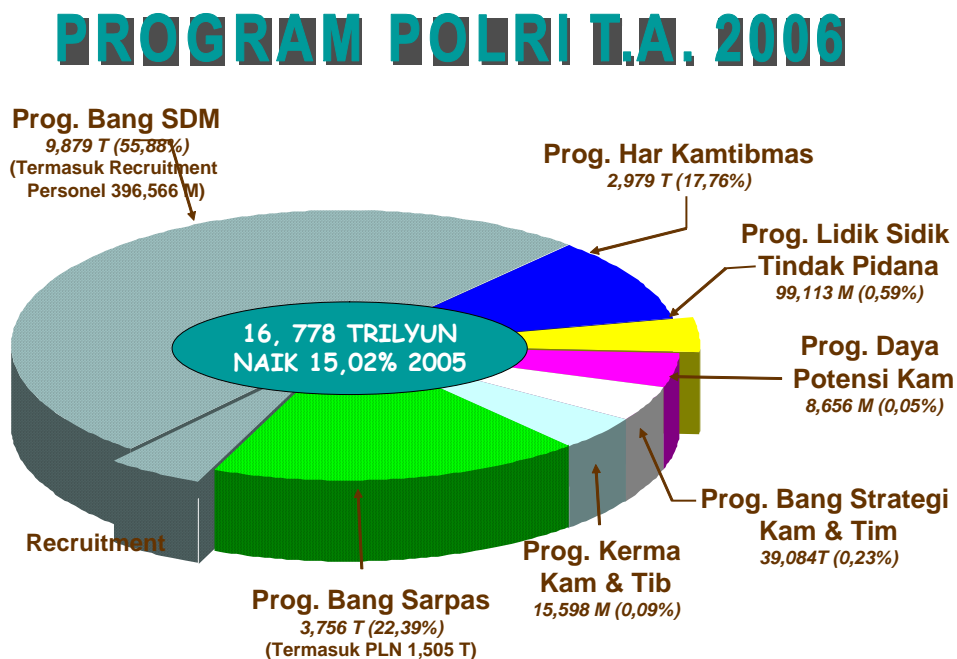
⁶ Media Indonesia, 21-03-06, Elite Politik Diduga Terlibat

M Top.⁷ BIN menghabiskan biaya USS 30 ribu per bulan guna melobi Kongres Amerika tanpa tujuan yang jelas.⁸ Padahal urusan lobi bukan kewenangan pihak BIN. Menjelang Pilkada Aceh, Kepala BIN Syamsir Siregar mendramatisir keadaan. Syamsir menyatakan, intelijen mendeteksi potensi konflik yang menyertai pelaksanaan Pilkada Aceh, karena adanya mantan anggota GAM mencalonkan diri menjadi kepala daerah.⁹ Kenyataannya Pilkada di Aceh berlangsung aman dan damai.

Gejala ini merupakan pola lama, yakni propoganda intelijen untuk mengalihkan perhatian, dengan selubung ideologi dan doktrin kedaulatan negara sebagai tameng perlindungan. Hal ini jelas ingin mengembalikan perilaku rezim Orde Baru, untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan politik tertentu. Ideologi komunis dijadikan sarana untuk melancarkan tujuan, termasuk membenarkan proyek pembentukan komunitas intelijen daerah (Kominda). Apalagi dengan kondisi saat ini, ormas mudah terprovokasi tentang bahaya komunis. Ini ingin menutupi kinerja BIN yang buruk dalam mengatasi aksi teror.

2006: Tahun Kegagalan Polri Bangun Kepercayaan (trust)

Kinerja Polri belum berubah. Penanganan Polri dalam menyelidiki dan menyidik kasus-kasus pidana juga jauh dari maksimal. Faktor penyebabnya beragam, dari ketidakjelasan penyidikan di tingkat kepemimpinan, pengaruh eksternal hingga minimnya anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan (Lihat gambar berikut: Bambang Widodo Umar). Anggaran penanganan kasus biasa, jelas berbeda dengan anggaran penanganan kasus-kasus terorisme. Contoh mengenai buruknya kinerja Polri terlihat dalam penanganan kasus Munir, yang jelas terkesan lambat, dan mencari-cari alasan teknis untuk menunda penyidikan. Parahnya lagi, ketika hasil kerja Polri berakhir dengan putusan Mahkamah Agung dan pemberian remisi bagi Pollycarpus, yang diyakini POLRI terlibat.



Keterangan :

- Har = pemeliharaan, Tin = ruting, sarpas = sarana prasarana, kerma = kerukunan masyarakat.

Sepanjang tahun 2006, Kontras mencatat 92 kasus yang melibatkan aparat Polri. Keterlibatannya dari pelaku tunggal hingga berkelompok. Kasus menonjol adalah penganiayaan 36 Kasus dan penembakan

⁷ Tempo, 08-03-06, BIN Akui Sulit Tangkap Noor Din

⁸ 11-09-06, Intelijen Pakai Yayasan Gusdur Melobi Amerika

⁹ Media Indonesia, 29-09-06, BIN Deteksi Konflik Pilkada Aceh

18 kasus. Penembakan terhadap pelaku kriminal sejumlah 26 kasus. Kasus lainnya adalah perkelahian antara aparat Polri dan TNI. Sepanjang tahun 2006, terdapat 12 kasus. Sebab terjadinya aksi ini adalah ada pihak merasa intitusinya lebih tinggi dari institusi lain, atau terkadang masalah pribadi melibatkan intitusi, rasa bangga yang berlebihan terhadap intitusi.

Kultur militerisme juga belum hilang. Kontras mencatat tindak kekerasan, pemukulan, penembakan, penyalahgunaan senjata api, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang hingga penggunaan metode penyiksaan oleh aparat Polri. Perilaku ini muncul saat menghadapi pelaku kriminal, warga sipil, rekan sesama Polri dan TNI. Perkelahian antar satuan Polri dan TNI masih terjadi di tahun 2006.

Keadaan ini mencerminkan bahwa Polri belum membangun jati dirinya, apalagi membangun “trust”. Polri yang bertanggungjawab terhadap keamanan dalam negeri belum optimal mengelola potensi keamanan yang ada (polsus, ppns, dst). Polri masih bekerja untuk lembaga sendiri. Akuntabilitas Polri tidak jelas. Disamping sentralisasi masih dipertahankan. Koordinasi kerja antar kesatuan Polri (Mabes, Polda, Polres) dalam operasi rutin juga tidak jelas. Jika keadaan ini dibiarkan, apa mungkin Polri mampu membangun kepercayaan dari masyarakat? Polri harus mampu mengubah postur dirinya yang militeristik menjadi polisi penegak hukum, meninggalkan ciri-ciri organisasi militer, metode dan kurikulum.

2006: HAM rakyat bawah diserang kepentingan ekonomi elite

Penguasaan sumber daya ekonomi mengambil bentuk aksi-aksi kekerasan oleh aparat pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban (trantib), satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP), polisi, atau bahkan institusi militer. Aksi-aksi ini dilakukan saat menggusur pasar tradisional, para pengusaha informal, pemukim marjinal di perkotaan, hingga merampas tanah milik penduduk. Pemerintah gagal menggunakan patokan prosedur damai dan masih mempertahankan metode represif. Tindakan ini merupakan hilangnya akal pemerintah dalam mengidentifikasi akar persoalannya, yaitu masalah kemiskinan. Penyelesaiannya, bukan dengan cara menaikkan upah buruh, menyediakan tempat untuk pedukung kaki lima, menyediakan rumah murah bagi penduduk, tapi justru dengan pendekatan kekerasan yang membawa mereka semakin terjerembab dalam jurang kemiskinan. Kekerasan ini bukan hanya keji, namun juga akan membuat pemerintah tidak akan pernah mampu menyelesaikan problem kemiskinan. Oleh karena itu, Kontras mendesak Pemerintah untuk menghentikan tindakan represif Pemerintah Daerah pada masyarakat miskin, pedagang kaki lima dan asongan, tukang becak, fakir miskin dan anak jalanan. Kebijakan ini mendesak mengingat rakyat akar rumput sedang kesulitan bahan-bahan pokok sehari-hari.

Kekerasan Satpol PP Periode Januari - Desember 2006

No	Jenis Tindakan	Jumlah	Korban			
			Rumah	Kios	Luka	Tewas
	Penggusuran	9	620	0	2	0
	Pemukulan	4	0	0	8	0
	Penggusuran PKL	11	0	62	11	1
	penangkapan	1	0	0	0	0
	penganiayaan	7	0	0	11	0
	Pemerasan	1	0	0	0	0
	Bentrokan dengan warga	2	0	0	0	0

2006: TNI Otonom dari Kontrol Politik dan Hukum

Tahun 2006 profesionalitas TNI tidak menunjukkan perubahan signifikan. Selain tetap tak tersentuh oleh akuntabilitas HAM dalam kasus pelanggaran HAM, anggota TNI kerap terlibat sejumlah kasus

penembakan, penganiayaan, penculikan dan penangkapan sewenang-wenang. Pada kasus kriminalitas banyak didapati anggota TNI terlibat narkoba dan skandal senjata. Catatan buruk ini mempersulit reformasi TNI.

Militer masih kuat dalam peta percaturan politik. Ini tampak dari resistensi korps untuk melindungi anggotanya dari proses hukum kasus pelanggaran HAM maupun kriminal. Misalnya, penyelidikan KPP HAM atas dugaan terjadinya pelanggaran berat HAM kasus Talangsari, Penculikan Aktivis 1998, kasus Trisakti dan Semanggi. Sikap resisten juga tampak melalui sikap Departemen Pertahanan untuk tidak menyetujui gagasan RUU Peradilan Militer yang baru soal Pengadilan Umum bagi anggota militer yang melakukan kejahatan sipil umum. Peristiwa di atas menunjukkan kuatnya pembangkangan militer terhadap otoritas sipil, yang juga menunjukkan ketidakmampuan kekuatan sipil melakukan koreksi terhadap kekerasan dan hegemoni militer yang membuat militer menjadi kekuatan yang otonom. Akhir-akhir ini, sikap politik Try yang menghendaki pergantian kepemimpinan nasional di tengah jalan telah mencerminkan situasi tersebut.

Dalam catatan KontraS, terdapat 27 peristiwa dengan rincian sekitar 45 bentuk kasus kekerasan yang dilakukan aparat TNI. Kasus ini tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Bentuk-bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah penganiayaan dan penembakan, beberapa diantaranya berakibat kematian pada korban, termasuk perempuan dan anak-anak.

Ada beberapa kasus yang menarik. Misalnya, istri salah satu pelaku menjadi korban penganiayaan, berdimensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu terdapat kasus pelanggaran liputan wartawan yang diikuti pemukulan dan perusakan barang milik wartawan. Dalam beberapa kasus juga didapati bahwa kekerasan menjadi instrumen pendukung kerja kriminal anggota TNI, seperti menculik untuk tujuan pemerasan. Terdapat pula penganiayaan terhadap anak-anak oleh dua anggota TNI yang melakukan pekerjaan sampingan (berbisnis) sebagai penjaga kompleks perumahan. Pada beberapa kasus lainnya juga didapati latar belakang ekonomi dalam kekerasan. Di wilayah konflik, seperti Aceh dan Papua, TNI masih melakukan sweeping. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi damai Aceh, belum sepenuhnya dipahami oleh anggota TNI.

Aparat militer juga terlibat dalam 36 peristiwa kriminal di berbagai wilayah. Bentuk yang paling menonjol adalah Narkoba, pencurian, perampokan atau perampasan. Kasus-kasus Narkoba terjadi dalam berbagai bentuk keterlibatan, dari pengguna, terlibat sindikasi sampai menjadi pengedar.

Di samping itu, keterlibatan aparat militer tampak dalam kasus yang cukup menyita perhatian, yaitu penggunaan senjata api untuk perampasan, pencurian secara kasar. Aparat militer juga terlibat dalam jaringan pencurian mobil, illegal logging serta penggunaan narkoba dan miras yang memicu anggota TNI melakukan kekerasan. Bahkan juga terjadi anggota TNI yang melakukan provokasi berbau SARA. Selain itu, terdapat kasus dimana terjadi perampokan yang melibatkan anggota TNI sebagai orang dalam yang bertugas sebagai petugas keamanan disalah satu Bank. Hal ini menandakan bahwa melibatkan anggota TNI dalam bisnis pengamanan bukanlah jaminan.

Selain kekerasan terhadap warga sipil, TNI diberbagai wilayah di Indonesia, masih terlibat bentrokan atau permusuhan sesaat dengan satuan-satuan Polri. Tercatat 12 kali peristiwa bentrokan ini terjadi mengakibatkan 4 korban meninggal dunia dan 13 orang luka-luka. Catatan penting dari hal ini adalah, pertama, bentrokan kekerasan antara TNI dan Polri biasa terjadi diluar alasan operasional keamanan dan pertahanan negara, seperti, soal salah menanggapi teguran salah satu pihak. Kedua, bentrokan ini melibatkan anggota-anggota TNI maupun Polri yang berpangkat rendah, aktif di kesatuan-kesatuan dan memiliki akses penuh dalam penggunaan senjata api. Ketiga, bentrokan terjadi diwilayah-wilayah rawan kekerasan dimana seharusnya kehadiran TNI dan Polri semakin memberikan rasa aman, seperti di Mamuju-Sulbar, Poso-Sulteng, Ambon-Maluku dan Atambua-NTT.

Tahun ini ditandai pula dengan penyimpanan senjata api diluar batas normal (Brigjen Koesmayadi). Cerita temuan tersebut sesungguhnya merupakan puncak gunung es dari kasus-kasus serupa yang ada di Indonesia. Dalam catatan KontraS sepanjang 2006 terdapat kasus-kasus terkait kepemilikan senjata

api. Baik itu yang dimiliki secara ilegal, diperjualbelikan secara tidak sah, atau setidaknya tidak ditemukan dan tidak diketahui kepemilikannya.

Catatan atas peristiwa di atas adalah pertama, selain Koesmayadi yang berpangkat tinggi di jajaran TNI, didapati kepemilikan senjata-senjata tersebut oleh anak atau relasi keluarga dari para pejabat lama. Seperti Ari Sigit yang didapati menyimpan sejumlah peluru hasil pemberian kakeknya, Soeharto. Sedangkan pedagang ilegal senjata api adalah para anggota TNI berpangkat rendah. Kedua, senjata-senjata tersebut diperjual belikan/diselundupkan ke wilayah konflik, seperti Papua dan Aceh bahkan sampai ke kelompok pemberontak di Srilanka. Ketiga, senjata api yang tak bertuan banyak ditemukan tempat publik oleh orang sipil yang menemukannya secara tidak sengaja. Akan tetapi didapati juga senjata api dan bahan peledak ditempat-tempat fasilitas umum seperti jalur kereta api dan landasan udara. Keempat, dari data temuan-temuan yang ada bisa diduga bahwa senjata-senjata tersebut disembunyikan oleh seseorang secara sengaja.

Dari kecenderungan kekerasan, kriminalitas dan skandal-skandal senjata api yang melibatkan anggota TNI, banyak didapati penyelesaiannya secara tidak jelas. Dari mulai tidak tersedianya informasi yang cukup atas penyelesaian kasus-kasus tersebut sampai kesengajaan untuk melarang pemberitaan mengenai kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI. Ini sekaligus menandakan bahwa mekanisme penyelesaian lewat sistem pidana militer tidak menjamin asas keterbukaan terlaksana.

2006: Tahun Penuh Teror bagi masyarakat Poso

Tahun 2006 merupakan tahun yang terberat bagi masyarakat Poso. Teror terus menghantui dalam berbagai bentuk. Berbagai peristiwa kekerasan seperti penembakan, peledakan dan penemuan bom, ancaman atau hasutan, penangkapan atau penahanan, serta penganiayaan meningkat dibandingkan tahun 2005. Ditambah provokasi dari aparat yang mengabaikan perlindungan masyarakat. Ketegangan konflik terus berupa dipicu, dengan menunjukkan simbol-simbol agama atau hasutan dan ancaman mengatasnamakan agama, walau jelas terlihat bahwa yang terjadi bukanlah konflik agama. Negara telah membiarkan keterlibatan aparat semakin dalam.

Meningkatnya kasus kekerasan tampak pada jumlah dan jenis kekerasan pada tahun ini. Sebanyak 68 peristiwa terjadi, umumnya berupa teror kepada masyarakat. Telah terjadi 19 kali pemboman serta 6 buah bom ditemukan walau tidak meledak. Ancaman dan hasutan serta pembakaran dan pengrusakan fasilitas publik juga menguat. Korban meninggal mencapai 7 orang, akibat pemboman, penembakan maupun pembunuhan. Salah seorang pendeta dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah ditembak orang tak dikenal di tempat publik. Dari berbagai kekerasan yang terjadi, belum tampak adanya proses penegakan hukum yang komprehensif dari aparat keamanan serta ketidakterbukaan dan kurang akomodatifnya aparat dalam melihat situasi. Hal ini memicu bentrok massa dengan aparat Polisi/TNI sebanyak 6 peristiwa, yang menyebabkan 2 orang meninggal dan 1 orang luka-luka. Di Poso, konflik juga diwarnai dengan persepeteruan aparat keamanan sebanyak 2 kali karena persoalan sepele.

Sementara itu, tahun ini pemerintah masih menggunakan cara-cara parsial untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sejak 1998. Dilalui dengan pro dan kontra, hukuman mati terhadap Fabianus Tibo, Domingus Da Silva dan Marinus Riwu –yang dianggap dalang dari konflik 1998- akhirnya dilaksanakan. Padahal, selain melanggar hak mendasar manusia, hukuman mati terhadap Tibo dkk justru menutup kemungkinan diadakannya penyelidikan atas aktor-aktor yang terlibat saat awal konflik 1998. Seperti yang tampak dari terhentinya proses pemeriksaan atas 11 nama yang disebutkan Tibo dkk dalam persidangan. Hukuman mati terhadap Tibo juga terbukti tidak menghentikan teror dan kekerasan di Poso.

Ketidakmauan aparat untuk menyelesaikan konflik serta mengidentifikasi aktor-aktornya juga tampak dari pemusnahan berbagai barang bukti. Tercatat 2 kali Koopskam melakukan pemusnahan senjata api. Padahal dari 5 buah penemuan senjata api baik yang rakitan maupun organik, ditemukan sebanyak 206 senjata rakitan, senjata standar organik 13 buah, amunisi sebanyak 1.353, bom rakitan sebanyak 65

buah dan 5 buah granat. Akan tetapi temuan-temuan ini tidak menunjukkan signifikansi penghentian kekerasan di Poso. Padahal semestinya, penemuan alat-alat bukti ini dapat dijadikan petunjuk awal bagi berbagai kekerasan yang terus berlangsung. Pihak Polri justru tidak mencari pemasok dan pengguna senjata-senjata tersebut.

Koopskam juga melakukan penggalian dan rekonstruksi atas beberapa peristiwa masa lalu secara mendadak, tanpa melibatkan Komnas HAM serta ahli-ahli independen serta tidak melewati prosedur yang baku. Pemusnahan ini justru dikhawatirkan akan menguburkan kebenaran atas peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

Isu terorisme menjadi komoditas politik. Minimnya gagasan komprehensif bagi penyelesaian Poso juga dilakukan melalui penangkapan-penangkapan secara sembarangan terhadap pihak-pihak yang dituduh, melalui penggunaan UU Anti Terorisme. Tercatat telah terjadi 3 peristiwa penangkapan sewenang-wenang yang menyebabkan 7 orang luka-luka. Namun pelaku dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menggelar persidangan terhadap terdakwa Ipong Yusuf, Andi Makasaw dan Reyfendi. Namun dari kesaksian terdakwa, tampak bahwa mereka harus melalui penyiksaan fisik untuk mengakui perbuatannya. Pengadilan juga telah menyidangkan peristiwa pembunuhan siswi SMU tahun lalu, yang juga didakwa dengan UU Teroris. Pelanggengan isu teroris ini terus dikembangkan dengan pengumuman 29 orang nama sebagai DPO. Penyederhanaan isu Poso menjadi isu teroris ini menjadi model bagi wilayah pemberantasan teroris di Indonesia. Ini tak bisa dilepaskan dari bantuan luar negeri (AS) untuk meningkatkan Polri, termasuk Detasemen Khusus 88 dalam pemberantasan proyek global anti terorisme.

DATA KEKERASAN Poso 2006

No	Peristiwa	Jumlah Kasus	Korban		Keterangan
			Meninggal	Luka-luka	
1	Penangkapan/ penahanan sewenang-wenang	3	0	7	Umumnya korban ditangkap dengan tuduhan sebagai pelaku kekerasan di Poso namun setelah diproses tidak terbukti
2	Pemboman	19	2	1	Terjadi peningkatan dari tahun 2005 yang Cuma terjadi 9 kali
3	Penemuan bom	6	0	0	
4	Ancaman/ Hasutan	18	0	0	teror bom, sms u/ memprovokasi agar timbul kemarahan dan bentrokan, letusan senjata
5	Penembakan	4	2	1	dilakukan orang tak dikenal
6	Penganiayaan	1	0	3	
7	Bentrok Massa VS Aparat (TNI/Polri)	6	1	3	umumnya terjadi akibat tindakan aparat keamanan yang tidak terbuka dan akomodatif melihat situasi lapangan dan masyarakat
8	Pembakaran/ Pengrusakan	8	0	0	Umumnya dilakukan orang tak dikenal
9	Perseteruan aparat keamanan	2	0	0	Karena persoalan sepele
10	Pembunuhan	1	2	0	Kasus pembunuhan warga Masamba
	TOTAL	68	7	15	

Sumber: database KontraS, diolah dari berbagai sumber

Penutup

Sepanjang tahun 2006, isu-isu HAM berkembang pada ruang publik yang terbatas. Pada bidang kehidupan institusi-institusi formal, HAM dibatasi pada wacana dan retorika institusi politik negara yang formalistik. HAM gagal dijalankan sebagai agenda politik kenegaraan. Akibatnya, politik negara dikalahkan oleh kekuasaan ekonomi modal, dan dirusak oleh tindakan sekelompok orang yang ingin membangun klaim kekuasaan ideologis sektarian. Sementara itu, relasi-relasi kuasa masa lalu menghasilkan situasi impunitas *de facto* dan *de jure*. Karena itu, Kontras menuntut lembaga-lembaga tinggi negara untuk menghentikan praktek-praktek politik yang dapat menghambat penegakan HAM.

Demikian refleksi akhir tahun ini kami sampaikan. Terima kasih.

Jakarta, 26 Desember 2006